

Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri 40 Kota Pekanbaru)

Natasya Dwi Falisa¹ Dia Meirina Suri²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution

No.133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

natasyafalisa@student.uir.ac.id diameirinasuri@soc.uir.ac.id

Received :10 Juni 2025

Abstract

This study aims to analyze the role of the Pekanbaru City Education Office in implementing inclusive education at the elementary school level, focusing on a case study at Public Elementary School 40 in Pekanbaru City. Inclusive education is an approach that ensures every child, including children with special needs, has equal opportunities to access quality education. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The research informants include representatives from the Pekanbaru City Education Office, school principals, teachers, parents, and students at Public Elementary School 40. The findings reveal that the Pekanbaru City Education Office plays a strategic role in supporting the implementation of inclusive education. These roles include policy development, providing teacher training, resource allocation, and monitoring the implementation of inclusive education programs. However, several challenges remain, such as the lack of trained human resources, insufficient supporting facilities, and low public awareness of the importance of inclusive education. This study concludes that although the Pekanbaru City Education Office has made efforts to fulfill its role in organizing inclusive education, further improvements are needed to enhance its implementation. These include increasing teacher capacity, providing adequate infrastructure, and raising public awareness about inclusivity.

Key Words : Role, Education Office, Inclusive Education, Elementary School, Pekanbaru City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar, dengan fokus pada Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 40 Kota Pekanbaru. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memastikan setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan yang bermutu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, kepala sekolah, guru, orang tua anak berkebutuhan khusus di SD Negeri 40. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif. Peran tersebut meliputi penyusunan kebijakan, pemberian pelatihan kepada guru, alokasi sumber daya, dan monitoring pelaksanaan program pendidikan inklusif. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah berupaya menjalankan perannya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, masih diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kualitas implementasi, termasuk peningkatan kapasitas guru, pengadaan sarana prasarana yang memadai, serta kampanye kesadaran inklusivitas kepada masyarakat.

Key Words : Peran, Dinas Pendidikan, Pendidikan Inklusif, Sekolah Dasar, Kota Pekanbaru

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Pemerintah Indonesia, melalui konstitusi dan berbagai regulasi, telah menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Salah satu bentuk implementasi dari amanah tersebut adalah dengan menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk belajar bersama di sekolah umum tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan sebagai pelaksana teknis kebijakan pendidikan di wilayahnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan inklusif melalui penetapan sekolah-sekolah inklusi, termasuk SD Negeri 40 Kota Pekanbaru sebagai salah satu sekolah pelaksana pendidikan inklusif sejak tahun 2017. Berdasarkan data Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, sekolah ini memiliki 13 siswa berkebutuhan khusus dari berbagai latar belakang kebutuhan seperti autisme, kesulitan belajar, tuna grahita ringan, dan tuna wicara. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai kendala mulai dari kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga dukungan kebijakan teknis dan anggaran.

Kehadiran Dinas Pendidikan sebagai pemegang otoritas kebijakan pendidikan di tingkat kota menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat secara efektif dan efisien. Menurut Siagian (2012), administrasi publik adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Chandler (dalam Indradi, 2011) menyatakan bahwa administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan publik. Dalam konteks pendidikan, administrasi publik mengatur bagaimana negara memenuhi hak pendidikan warga melalui sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas.

Organisasi Publik dan Pemerintah Daerah

Organisasi publik merupakan institusi yang bergerak dalam pelayanan masyarakat. Menurut Robbins (2015), organisasi publik adalah kesatuan sosial yang secara sadar dikoordinasikan, dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, untuk mencapai tujuan kolektif. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan adalah organisasi publik di bawah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di wilayahnya.

Rasyid (2007) menyatakan bahwa manajemen pemerintahan daerah harus berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan harus mampu merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dan menjamin pelaksanaannya di lapangan.

Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang mengikutsertakan semua anak dalam proses belajar, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), di sekolah reguler. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran bersama dengan peserta didik pada umumnya.

Menurut Ilahi (2013), pendidikan inklusif bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dalam pendidikan dan mendorong penerimaan sosial terhadap keberagaman kemampuan peserta didik. Garnida (2015) menambahkan bahwa pendidikan inklusif adalah upaya untuk menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak reguler tanpa membedakan potensi dan kelemahan yang dimiliki masing-masing individu.

Pendidikan inklusif bukan hanya sistem pembelajaran, tetapi juga bagian dari gerakan hak asasi manusia yang menjamin keadilan sosial dan kesetaraan akses terhadap pendidikan.

Teori Peran dalam Pelayanan Publik

Peran merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukan dalam struktur sosial. Soekanto (2013) menyatakan bahwa peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan status atau kedudukannya dalam masyarakat. Peran terdiri atas:

- Peran Aktif: Peran yang terlihat jelas dalam tindakan nyata dan inisiatif, seperti membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran.
- Peran Partisipatif: Peran yang dilakukan berdasarkan kerja sama atau permintaan dari pihak lain.
- Peran Pasif: Peran simbolis yang minim keterlibatan aktif dan biasanya hanya menjalankan kewajiban administratif saja.

Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan sebagai institusi pemerintah diharapkan menjalankan peran aktif dan partisipatif untuk memastikan implementasi pendidikan inklusif berjalan sesuai amanat perundang-undangan.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori di atas, maka peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori peran (role theory) Soekanto untuk melihat sejauh mana inisiatif, keterlibatan, dan kontribusi Dinas dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Fokus analisis diarahkan pada kebijakan, pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi, serta kampanye kesadaran publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri 40 Pekanbaru. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman

yang utuh terhadap realitas sosial yang kompleks melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di **SD Negeri 40 Kota Pekanbaru**, yang merupakan salah satu sekolah inklusi resmi berdasarkan SK Walikota Pekanbaru tahun 2017. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama dua bulan, yakni dari September hingga Oktober 2024.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik **triangulasi sumber dan metode**. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data yang berbeda (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Selain itu, **member checking** dilakukan dengan meminta klarifikasi dan konfirmasi ulang kepada informan atas data dan interpretasi yang telah diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Peran dalam Penyusunan Kebijakan Pendidikan Inklusif

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah menerbitkan kebijakan berupa SK Walikota yang menunjuk sekolah-sekolah inklusi, termasuk SD Negeri 40. Kebijakan ini menjadi dasar legal operasionalisasi pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Namun, hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 40 mengungkapkan bahwa:

"Kami belum menerima petunjuk teknis yang jelas dalam implementasi pendidikan inklusif.

Sejauh ini masih berdasarkan inisiatif sekolah masing-masing."

Artinya, meskipun kebijakan telah ada, belum dilengkapi dengan petunjuk teknis (juknis) atau standar operasional prosedur (SOP) yang komprehensif. Hal ini menyebabkan perbedaan persepsi dan praktik antara sekolah satu dengan lainnya.

Peran dalam Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Guru

Pelatihan guru merupakan komponen penting dalam pendidikan inklusif. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru secara rutin menyelenggarakan pelatihan dasar inklusi sebanyak dua kali setahun. Namun, keterbatasan anggaran membuat pelatihan hanya diikuti oleh perwakilan guru, bukan semua guru. Seorang guru pendamping khusus (GPK) menyampaikan:

"Pelatihan yang kami terima masih bersifat umum, padahal kami butuh pendekatan spesifik untuk menangani anak autis atau disleksia, misalnya."

Pelatihan belum menyentuh pendalaman praktis terhadap penanganan berbagai jenis disabilitas. Selain itu, tenaga GPK masih terbatas dan belum semuanya mendapat pelatihan formal.

Peran dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi elemen pendukung utama dalam pembelajaran inklusif. Berdasarkan observasi di SD Negeri 40, ditemukan bahwa sekolah belum sepenuhnya ramah disabilitas. Beberapa catatan penting:

- Toilet khusus disabilitas belum tersedia.
- Tidak ada jalur landai atau guiding block untuk mobilitas anak difabel.
- Ruang konseling tidak tersedia secara khusus.
- Alat bantu belajar untuk ABK masih minim.

Dinas Pendidikan mengakui bahwa anggaran untuk fasilitas inklusif masih terbatas dan belum menjadi prioritas dalam alokasi tahunan.

Monitoring dan Evaluasi Program Inklusif

Monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan minimal satu kali dalam setahun melalui supervisi langsung ke sekolah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi lebih

banyak berfokus pada **aspek administratif**, seperti kelengkapan laporan dan jumlah siswa, bukan pada kualitas pembelajaran atau perkembangan peserta didik. Kepala Seksi Kurikulum menyebutkan:

“Kami masih dalam tahap membangun sistem pelaporan dan evaluasi kualitas pembelajaran inklusif. Sekarang fokus kami masih pada pendataan dan pembinaan awal.”

Ini menunjukkan perlunya indikator evaluasi khusus yang dapat mengukur keberhasilan pendidikan inklusif, tidak hanya dari sisi kuantitatif tetapi juga perkembangan sosial dan akademik siswa ABK.

Tantangan Sosial dan Budaya

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif adalah minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Beberapa orang tua siswa reguler mengeluhkan keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas yang sama karena dianggap mengganggu proses belajar. Guru kelas menyampaikan:

“Masih ada orang tua yang minta anak-anak berkebutuhan khusus dipisahkan, bahkan ada yang protes secara langsung ke sekolah.”

Stigma sosial ini menjadi hambatan dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan inklusif. Dinas Pendidikan belum secara optimal melakukan kampanye publik atau edukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri 40 Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Peran Dinas Pendidikan secara umum sudah dilaksanakan namun belum maksimal. Dinas Pendidikan telah menetapkan kebijakan dengan menunjuk sekolah-sekolah inklusi melalui SK Walikota, termasuk SD Negeri 40. Namun, kebijakan tersebut belum diikuti oleh petunjuk teknis (juknis) yang jelas, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi tidak seragam.
2. Pelatihan guru masih terbatas dan belum menyentuh aspek praktis. Meskipun pelatihan diselenggarakan secara berkala, keterlibatan guru pendamping khusus dan guru kelas masih terbatas. Materi pelatihan juga belum mendalam dalam membekali guru menangani anak dengan berbagai ragam kebutuhan khusus.
3. Sarana dan prasarana belum memadai untuk menunjang pendidikan inklusif. Sekolah masih kekurangan fasilitas fisik yang ramah disabilitas seperti jalur landai, toilet khusus, dan ruang layanan konseling. Selain itu, alat bantu belajar untuk anak berkebutuhan khusus masih sangat terbatas.
4. Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan masih bersifat administratif. Evaluasi yang dilakukan lebih menekankan pada laporan formal, sementara aspek kualitas pembelajaran, perkembangan siswa ABK, dan dampak program belum menjadi fokus utama.
5. Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap pendidikan inklusif. Masih terdapat resistensi dari sebagian orang tua siswa terhadap keberadaan siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi publik secara berkelanjutan.

Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berada pada posisi transisional, yaitu sudah menunjukkan komitmen melalui kebijakan, namun belum sepenuhnya siap dalam hal pelaksanaan teknis dan pemberdayaan sekolah.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ambar, T. S. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Bagong, S. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada. Media Group. Cohen, B. J. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, M. B. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Darma, I. P., & Rusyid, B. (2013). Pelaksana Sekolah Inklusi Di Indonesia. *Jurnal Prosiding Ks: Riset & PKM*, 2(2), 226-227.
- Dewi, I. C. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya. Fahmi, I. 2013. *Perilaku Organisasi, Teori, Aplikasi dan Kasus*. Bandung: Alfabeta. Garnida, D. 2015. *Pendidikan Inklusif*. Bnadung: PT Refika Aditama.
- Gie, T. L. 2007. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasibuan, M. S. P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herawati. 2021. Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Edu Humaniora*. 2(1), 1-11.
- Ilahi, M. T. 2013. *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Implementasi*. Ar-ruzz Media: Jogjakarta. Indradi, S. S. 2011. *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
- Ju'beh, K. A. 2017. *Disability Inclusive Development Toolkit*. Bensheim: CBM. Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II*. Jakarta: Rineka Cipta. Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mahsun. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, A. A. A. P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. 2015. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Meka, M., Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. 2023. Pendidikan Inklusi Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Berkebutuhan Kusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 1(1), 20-30.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Miller, F. A., & Katz, J. H. 2009. *The Inclusion Breakthrough: Unleashing the Real Power of Diversity*. San Fransisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc.
- Naja, H. R. D. 2013. *Manajemen Fit & Proper Test*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.

- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbang Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.

- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis-Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset*

Sosial Humaniora, 7(1), 521-529.

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.

- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the

environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.

Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.

Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.

Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.

Narwoko, J. D., & Suyanto, B. 2014. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Prenada Media Group.

- Pananrangi, A. R. 2017. *Manajemen Pendidikan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Rasyid, M. R. 2007. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan)*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Rivai, V. 2013. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riyadi. 2011. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia.
- Robbins, S., P. 2015. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Jakarta : Arcan.
- Siagian, S. P. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Sinambela, L. P. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsir, T. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M, 2016. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ulum, I, 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Windy, Y. D., Ningtyas, K., Amilia, F., & Kamilah, N. 2020. Inovasi Model Desain Universal Untuk Pembelajaran Kebutuhan Khusus Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan*, 5(2), 24-29.
- Wirutomo, P. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Sosiologi David Berry (Terjemahan buku The Principles of Sociology karya David Berry)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wulandari, P., Safitri, D., & Sujarwo. 2019. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dan Kaitannya dengan Interaksi Sosial Siswa Berkebutuhan Khusus. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 744-752.
- Zauhar, S. 2012. *Reformasi Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.